

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Cyntia Angel Meisy Purba¹, Daisy S. M. Engka², Jacline I. Sumual³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail : cyntiaangel30@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah adalah merujuk pada kemampuan suatu wilayah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini meliputi dampak pandemi yang masih berlangsung, ketidakstabilan pendapatan daerah, serta perlunya peningkatan efisiensi dalam pengeluaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif deskriptif dengan analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan aplikasi *Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dana Perimbangan juga berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan Pemerintah

ABSTRACT

The financial performance of the government refers to the ability of a region to identify and manage local financial resources to meet their needs, thus supporting the implementation of government and services to the community without fully relying on the central government. The financial performance of the Provincial Government of North Sumatra currently includes the ongoing impact of the pandemic, instability of regional revenue, and the need to improve efficiency in spending. The purpose of this research is to determine the effect of Local Revenue, Revenue Sharing Funds, and Economic Growth on the Financial Performance of the Government in North Sumatra Province. This research uses secondary data and is descriptive quantitative in nature with Multiple Linear Regression analysis using Eviews 12 application. The results of the study indicate that partially, Local Revenue has a positive and significant effect on the financial performance of the government. The Balance Fund also has a positive but not significant effect, while Economic Growth has a positive and significant effect on the financial performance of the government. Simultaneously, all three variables significantly influence the financial performance of the government in North Sumatra Province.

Keywords : Regional Original Revenue, Balance Funds, Economic Growth, Government Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah perlu terus berkembang dan bertransformasi, karena tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah ialah hak, kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom bagi mengelola serta mengatur masalah pemerintahan juga kepentingan masyarakat lokal tepat ketentuan hukum yang berlaku. (Ristanti, 2015).

Kinerja keuangan pemerintah adalah merujuk pada kemampuan suatu wilayah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Beberapa instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah ialah Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD), yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya. Di

samping itu, manajemen belanja daerah juga memegang peran krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. (Padang, 2023).

Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budayanya yang melimpah, serta menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, saat ini, provinsi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan masalah pengangguran yang perlu diatasi dengan cara yang efektif. Provinsi Sumatera Utara sekarang menghadapi sejumlah permasalahan perekonomian, meliputi: Kemiskinan tinggi, pengangguran, kualitas pendidikan yang belum optimal, inflasi, infrastruktur yang kurang memadai, sektor pertanian. Tantangan yang dihadapi dalam kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini meliputi dampak pandemi yang masih berlangsung, ketidakstabilan pendapatan daerah, serta perlunya peningkatan efisiensi dalam pengeluaran.

Tabel 1 PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Pemerintah Sumatera Utara 2009-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)	Dana Perimbangan (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi ADHK (%)	Kinerja Keuangan Pemerintah (Ribuan Rupiah)
2009	2.016.073.324	1.167.565.492	5,07	3.823.149.652
2010	2.554.780.317	1.247.727.249	6,42	4.232.169.602
2011	3.578.462.081	1.373.897.545	5,11	5.363.366.625
2012	4.052.104.891	1.605.181.560	4,96	7.922.705.446
2013	4.091.285.889	1.710.602.556	4,65	7.412.094.314
2014	4.416.811.865	1.812.638.981	3,88	7.823.455.215
2015	4.883.880.619	1.521.253.168	3,81	8.495.656.859
2016	4.954.833.101	5.219.273.756	3,94	10.976.894.772
2017	5.638.960.579	6.928.134.940	3,95	10.976.894.772
2018	5.638.960.579	7.055.134.429	4,06	13.544.555.111
2019	5.761.270.412	7.300.647.588	3,61	14.060.766.197
2020	5.531.237.378	7.347.748.112	-1,84	13.252.957.488
2021	5.991.151.366	7.434.780.086	1,12	14.533.386.681
2022	7.258.018.252	5.213.826.023	3,28	12.761.625.564
2023	7.225.690.000	5.413.640.339	3,60	14.323.522.555

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kinerja Keuangan Pemerintah menunjukkan tren yang meningkat secara umum, dengan nilai tertinggi pada tahun 2018 (13.544.555.111.000) dan penurunan pada tahun 2022 (12.761.625.564.000). Namun, Kinerja Keuangan Pemerintah kembali meningkat pada tahun 2023 (14.323.522.555.000), menunjukkan pemulihan setelah penurunan di tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, baik PAD, dana perimbangan, dan kinerja keuangan pemerintah menunjukkan tren peningkatan dalam jangka panjang.

Ketidakstabilan anggaran adalah masalah yang harus diatasi melalui berbagai upaya dan kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, diharapkan peningkatan pendapatan daerah dapat mendukung proses pembangunan, menstabilkan keuangan, serta memungkinkan daerah untuk secara mandiri mengelola kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi

Sumatera Utara?

3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kinerja Keuangan

Berdasarkan buku pedoman penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa, kinerja keuangan daerah dilakukan untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitas dari seluruh kegiatan tersebut, serta untuk menentukan peringkat capaian hasil pengelolaan keuangan yang dapat dijadikan dasar dalam perbaikan dan penghargaan bagi SKPD atau desa yang berprestasi. Kinerja keuangan daerah merujuk pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

2.2 Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang bukan dikembalikan dari pemerintah. (Yuwono 2005:107 dalam Wahyuningsih 2012). Selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diakui oleh pemerintah daerah sebagai peningkatan kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

2.3 Teori Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah bersumber dari APBN ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan daerah dalam merealisasikan tujuan otonomi, terutama dalam hal peningkatan layanan dan taraf hidup masyarakat. (Djaenuri, 2012 dalam Wahyuningsih). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan desentralisasi. Dana ini diberikan dari pendapatan APBN.

2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada kenaikan GDP/GNP yang mencerminkan kenaikan upah riil dan perbaikan standar hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika aktivitas ekonomi saat ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya, seperti yang dinyatakan oleh Asryad. (1999:13)

2.5 Penelitian Terdahulu

Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Dengan penelitian berjudul “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara”. Metode yang digunakan metode analisis regresi data panel dengan periode penelitian tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

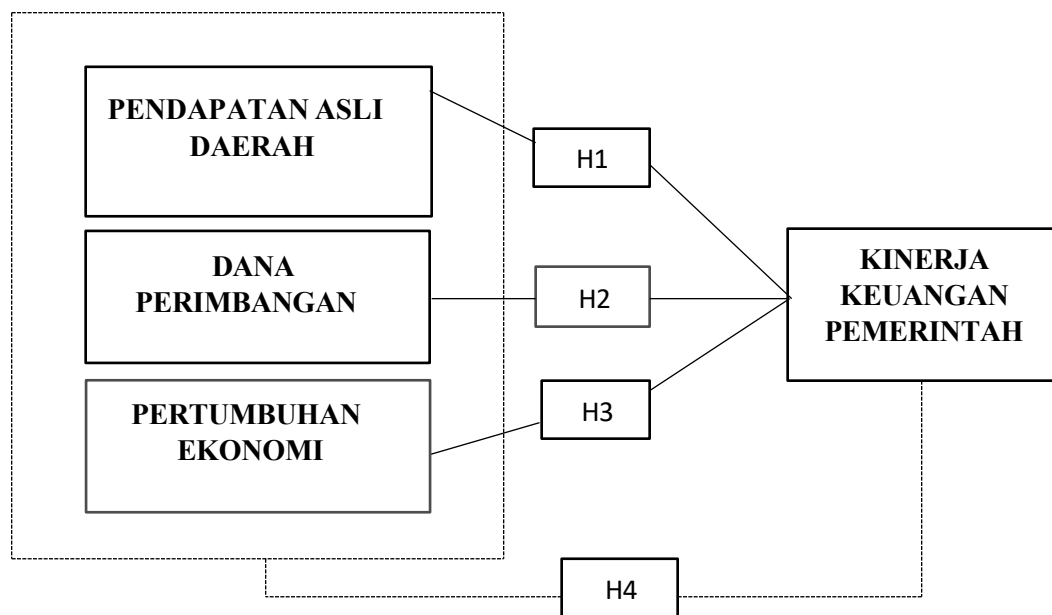
Rorimpandey, D. M., Engka, D. S., & Rorong, I. P. F. (2022). Dengan penelitian berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara Periode 2006-2020”. Analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dan secara simultan indeks pembangunan manusia, tenaga kerja dan investasi dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara.

Putri Marwati, R. (2019). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Penyertaan Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017)”. Metode analisis data menggunakan software Eviews versi 10 meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda Fixed Effect Model dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja pegawai berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan, PAD, dana perimbangan, belanja pegawai dan penyertaan modal daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2013-2017 dengan kontribusi pengaruh sebesar 99,26%.

Butar-Butar, N. V., Sagala, D., Simangunsong, G. A., Nainggolan, B. R. M., & Situmorang, D. M. (2023). “*The Effect of Regional Original Revenue, Balancing Funds, Capital Expenditure, and Financial Performance on Economic Growth in Regency/City in North Sumatra Province for the Years 2017-2021*”. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan program SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara dalam kaitannya dengan kemiskinan, dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan negatif/positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. 6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Kajian Teori (diolah Penulis), 2025

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Diduga Dana Perimbangan memiliki pengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
4. Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama- sama memiliki pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Sumatera Utara.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu kinerja keuangan pemerintah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi, dimana data tersebut data *time series*. Data bersumber dari Badan Pusat statistik Sumatera Utara, artikel, literatur maupun situs yang berkaitan.

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Kinerja keuangan pemerintah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang tercermin dari laporan keuangan, khususnya pada realisasi pendapatan dan belanja daerah di Sumatera Utara tahun 2009-2023 yang diukur dalam satuan Ribu Rupiah per tahun.
2. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2023 yang diukur dalam satuan Ribu Rupiah per tahun.
3. Dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2023 yang diukur dalam satuan Ribu Rupiah per Tahun
4. Pertumbuhan ekonomi yaitu laju pertumbuhan PDRB ADHK yang diukur dalam satuan wilayah Sumatera Utara 2009-2023 yang diukur dalam satuan % per tahun.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis data. Untuk mendukung proses analisis, penelitian ini memanfaatkan program *Eviews 12* sebagai alat bantu analisis data.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \varepsilon_t$$

Keterangan :

Y	= Kinerja Keuangan Pemerintah
β_1	= Koefisien Regresi parsial dari variabel Pendapatan Asli Daerah
β_2	= Koefisien Regresi parsial dari variabel Dana Perimbangan
β_3	= Koefisien Regresi parsial dari variabel Pertumbuhan Ekonomi
X1	= Pendapatan Asli Daerah (variabel bebas 1)
X2	= Dana Perimbangan (variabel bebas 2)
X3	= Pertumbuhan Ekonomi (variabel bebas 3)
ε	= Parameter Pengganggu
t	= <i>Time series</i>

Uji Parsial (Uji t)

Dalam analisis statistik, uji t bermanfaat untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel *independen* secara parsial serta menentukan apakah pengaruh tersebut signifikan. Untuk Kriteria pengujian yaitu jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel *independen* mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan. Sebaliknya, apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya salah satu variabel *independen* tidak mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dapat digunakan F digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel *independen* secara bersama-sama mempengaruhi variabel *dependen*. Untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dilihat dari nilai koefisien regresi variabel *independen* dengan tingkat kesalahan $\alpha=5\%$. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka secara statistik variabel *independen* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*. Sebaliknya, apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka secara bersama-sama variabel *independen* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk menilai sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel *dependen*. Menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel *dependen*.

Pengukuran ini diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan. Dengan demikian, koefisien determinasi berperan dalam menilai tingkat pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, serta membantu memahami seberapa besar variabel *independen* dapat menjelaskan perubahan dalam variabel *dependen*. Karena itu, penelitian juga memperhitungkan nilai *adjusted R²* sebagai faktor yang mendukung ketepatan nilai estimasi *R²*, terutama dalam model yang melibatkan lebih dari satu variabel *independen*.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi klasik yang berlaku, perlu dilakukan serangkaian uji asumsi klasik. Uji yang diterapkan mencakup uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan mampu menghasilkan estimasi yang dapat diandalkan, konsisten dan tidak bias.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah variabel *independen* dan *dependen* dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menganalisis grafik *Jarque-Bera* melalui *Histogram-Normality Test* (Ghozali, 2016 dalam Kusumaningtyas, 2022). Untuk melihat apakah regresi data normal berdistribusi normal atau tidak yaitu jika nilai probabilitas Jarque Bera (JB) hitung lebih besar dari tingkat kesalahan $\alpha =$ tingkat 5%, maka nilai residual berdistribusi normal dan sebaliknya jika kesalahan probabilitas Jarque Bera (JB) lebih kecil dari 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik, sehingga estimasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan atau korelasi antara residual dari satu pengamatan dengan residual dari pengamatan lainnya dalam model regresi dilakukan uji *Breusch-Godfrey* secara umum dikenal dengan uji *Lagrange-Multiplier (LM-test)* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas 0,05, maka dalam model regresi ada korelasi serial. Namun jika nilai probabilitasnya $> 0,05$, maka dalam model regresi tidak ada gejala autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan atau korelasi antara variabel *independen* dalam model regresi (Ghozali, 2016 dalam Kusumaningtyas, 2022). Untuk mengetahui apakah penelitian memiliki multikolinearitas atau tidak dari model penelitian dapat diasumsikan dari nilai toleransi (*tolerance value*) atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas *tolerance* $> 0,10$ dan batas *VIF* $< 10,00$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam model regresi linear digunakan untuk menilai apakah terdapat ketidak konsistenan dalam varians residual diantara pengamatan. Jika varians residual berubah-ubah di seluruh rentang data, maka model regresi mengalami heteroskedastisitas, yang dapat mempengaruhi keandalan estimasi parameter. Dalam penelitian ini digunakan uji white untuk menguji heteroskedastisitas dengan ketentuan apabila nilai probabilitas $> 0,05$ berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis menggunakan data penelitian maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Estimasi Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.232282	2.488381	0.495214	0.6302
LOG(PAD)	0.772774	0.114816	6.730526	0.0000
LOG(DANAPERIMBANGAN)	0.213052	0.057656	3.695245	0.0035
PE	-0.016866	0.016441	-1.025884	0.3270
R-squared	0.967693	Mean dependent var	29.84721	
Adjusted R-squared	0.958882	S.D. dependent var	0.447534	
S.E. of regression	0.090749	Akaike info criterion	-1.738252	
Sum squared resid	0.090590	Schwarz criterion	-1.549439	
Log likelihood	17.03689	Hannan-Quinn criter.	-1.740264	
F-statistic	109.8272	Durbin-Watson stat	2.414879	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12

Berdasarkan hasil output di atas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KKPD^{\wedge} = 1.232282 + 0.772774 \text{ PAD} + 0.213052 \text{ DP} - 0.016866 \text{ PE} + \text{Error}$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai Konstanta sebesar 1.232282 menyatakan bahwa ketika pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi adalah konstan (0), maka besarnya kinerja keuangan pemerintah di provinsi Sumatera Utara sebesar 1.232282%.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, jika PAD meningkat, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga akan meningkat. Koefisien regresi variabel PAD sebesar 0.772774 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% ($0.772774/100 = 0,00772774 \times 4.906.234.710.200$) akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.772774%.
- 3) Dana Perimbangan (DP) juga berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, peningkatan Dana Perimbangan akan diikuti oleh peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan sebesar 0.213052 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% ($0.213052 = 0,00213052 \times 4.152.803.454.933$) akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.213052%.
- 4) Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah justru diperkirakan mengalami penurunan. Koefisien regresi variabel PE sebesar -0.016866 mengandung makna bahwa setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% ($0.016866/100 = 0,00016866 \times 4.906.234.710.200$) akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.016866%.

Uji Statistik

Uji Parsial (Uji t)

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ dan $df = n - k (15 - 4) = 11$, maka diperoleh t-tabel sebesar 2.201. Dasar pengambilan keputusan: Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan $\text{prob.} > 0,05$, maka H_0 diterima H_a ditolak. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan $\text{prob.} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* ($df = n - k (15 - 4) = 11$, maka diperoleh t-tabel sebesar 2,201 dan t-hitung 6.730526, dengan demikian maka $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Dana Perimbangan (X2)

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap

kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* (df) = $n-k(15-4) = 11$, maka diperoleh t- tabel sebesar 2,201 dan t-hitung 3.695245, dengan demikian maka t-hitung > t-tabel. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Sumatera Utara.

3. Pertumbuhan Ekonomi (X3)

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* (df) = $n-k(15-4) = 11$, maka diperoleh t- tabel sebesar 2,201 dan t-hitung -1.025884, dengan demikian maka t-hitung < t- tabel. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Sumatera Utara.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil output regresi yaitu nilai F-statistik yang diperoleh 109.8272 sedangkan F-tabel 3,59 nilai F-tabel berdasarkan besarnya $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* (df) dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1/4-1$) = 3 dan df untuk deminator ($n-k/15-4$)=11 dengan demikian F-statistik > F-tabel yang artinya bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Sumatera Utara. Hal ini berarti kenaikan atau peningkatan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting dalam menurunkan atau mengatasi kinerja keuangan pemerintah di Sumatera Utara.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil output regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi nilai $R^2 = 0.967693$ berarti 96.76% variasi Kinerja Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan oleh PAD, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Sisanya 3,24% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara variabel independen dan dependen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil output uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai probability *Jarque-Bera* (JB) sebesar 0.674142 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Probability	Keterangan
0.674142	Normal

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji *Breush-Godfrey Serial Correlation LM- Test* diperoleh nilai dari Prob. *Chi-Square* lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0.1998 > 0,05), artinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi, sehingga model ini layak digunakan.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

F-Statistic	1.230698	Prob.F(2,9)	0.3369
Obs*R-squared	3.221330	Prob.Chi-Square(2)	0.1998

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar 2.844939, variabel dana perimbangan (X2) sebesar 3.398304 dan variabel pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 1.693247. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
C	NA
PAD	2.844939
DP	3.398304
PE	1.693247

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji glejser dimana nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai *Prob. Chi-Square(3)* pada *Obs*R-squared* yaitu sebesar 2.322136, oleh karena itu *Prob. Chi-Square* lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.5083 > 0.05$) artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-Statistic	0.671603	Prob.F(3,11)	0.5871
Obs*R-squared	2.322136	Prob.Chi-Square(3)	0.5083
Scaled explained SS	1.516062	Prob.Chi-Square(3)	0.6786

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12

4.2 PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Pada penelitian ini diperoleh hasil menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0.772774 dan nilai signifikansi 0.0000 (< 0.05). Artinya, setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0.772774%. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat.

Penelitian ini didukung oleh Putri Marwati, R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Penyertaan Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017) yang dimana hasil menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Pada penelitian ini diperoleh hasil menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien sebesar 0.213052 dengan tingkat signifikansi 0.0035 (< 0.05) mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Perimbangan sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar Rp 0.213052%. Hal ini membuktikan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Hasil ini sesuai dengan teori fiskal transfer yang menjelaskan bahwa Dana Perimbangan digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, sehingga memberikan dorongan positif terhadap perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Pada penelitian ini diperoleh hasil menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, meskipun secara statistik tidak signifikan (nilai signifikansi $0.3270 > 0.05$). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode penelitian. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktercerminan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan penerimaan daerah atau ketidakseimbangan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal dirasakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan pendapatan fiskal.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien negatif sebesar -0.016866 dengan nilai signifikansi 0.3270, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara, dan arah pengaruhnya justru negatif.

Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dominasi sektor informal, atau tidak tersalurkannya pertumbuhan ekonomi ke dalam penerimaan daerah secara langsung. Meskipun terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, hal tersebut belum tentu berdampak langsung pada kinerja fiskal pemerintah daerah jika tidak disertai dengan kebijakan fiskal yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi (secara simultan) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Pada uji simultan atau uji F yang menguji pengaruh seluruh variabel *independen* yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel *dependen* yaitu variabel kinerja keuangan pemerintah membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel *independen* berpengaruh dan signifikan terhadap variabel *dependen*.

Hal ini berarti bahwa kenaikan atau penurunan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi tersebut mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah di Sumatera Utara. Pemerintah perlu memastikan adanya sinergi antara peningkatan PAD, pemanfaatan dana perimbangan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar ketiganya saling memperkuat dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik Sumatera Utara <https://sumut.bps.go.id/id>

- Budianto, B., & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Butar-Butar, N. V., Sagala, D., Simangunsong, G. A., Nainggolan, B. R. M., & Situmorang, D. M. (2023). *The Effect of Regional Original Revenue, Balancing Funds, Capital Expenditure, and Financial Performance on Economic Growth in Regency/City in North Sumatra Province for the Years 2017-2021*. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 5(3), 13-22.
- Halim. (2007). Pengukuran kemandirian Keuangan Kinerja Keuangan. Yogyakarta: Andi.
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5).
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Nasution, N. A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 1- 19.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Putri Marwati, R. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Penyertaan Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemda (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat 2013–2017). (Skripsi, STEI Jakarta).
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK*, 2(1), 115-122.
- Rorimpandey, D. M., Engka, D. S., & Rorong, I. P. F. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara Periode 2006-2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 1-12.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Wahyuningsih, Y. E. (2012). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Yuliansyah, R., Susanti, E. I., & Yanti, A. (2020, March). The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013–2017. In AICAR 2019, 152-156. Atlantis Press.